TATA KELOLA LOKAL
KAWASAN HUTAN TERDEGRADASI PERTANIAN DI KHDTK SUBAN JERIJI

1. Bondan Winarno, S.Hut., MMT., MG.
2. Bambang Tejo Premono, S.Hut., MSi
3. Ari Nurlia, S.Hut
4. Nanang Herdiana, S.Hut., M.Sc
5. Teten Rahman

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PALEMBANG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PALEMBANG, DESEMBER 2017

ABSTRAK

Penguasaan lahan merupakan salah satu pangkal sebab terjadinya konflik agraria di Indonesia. Penguasaan lahan erat kaitannya dengan penghidupan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan. Sektor kehutanan seringkali berada pada posisi yang dilematis karena harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Pada konteks pengelolaan kawasan hutan pada skala lokal seperti Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), pelajaran-pelajaran tersebut menjadi penting sebagai bahan pertimbangan strategi pengelolaan hutan yang lebih baik. Kondisi di KHDTK dapat menjadi laboratorium lapangan dalam mencari solusi terhadap berbagai konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Tujuan umum penelitian ini adalah memperoleh pilihan model pengelolaan KHDTK Suban Jeriji yang adaptif, akomodatif dan melibatkan peran aktif para pihak terkait. Hasil penelitan menunjukkan KHDTK Suban Jeriji memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Model pengelolaan kolaboratif menjadi pilihan dalam mengelola kawasan hutan berdasarkan kondisi saat ini. Membangun jejaring kerja dengan para aktor menjadi hal kunci sebagai langkah awal membangun kelembagaan. Kawasan ini dapat berkembang menjadi model litbang hasil hutan bukan kayu sebagai ciri khas pengelolaan KHDTK yang adaptif dan partisipatif. Diversifikasi jenis tanaman menjadi hal penting dalam pengembangan pengelolaan KHDTK yang mengakomodasi kepentingan para aktor terkait. Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantapan kawasan hutan menjadi dua kegiatan prioritas yang perlu seger dilakukan oleh pengelola. Arah kebijakan di level pengelola perlu menjadikan KHDTK sebagai lokasi riset prioritas dengan dukungan fasilitasi berbagai sarana dan prasarana.

Kata kunci: *aktor, komunikasi, litbang hasil hutan bukan kayu, penguasaan lahan hutan, penghidupan masyarakat, pengelolaan kolaboratif.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik agraria antara negara dan turunannya dengan petani masih umum terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, tercatat 252 konflik agraria terjadi di Indonesia yang melibatkan sedikitnya 108.714 KK dengan luas wilayah konflik mencapai 400.430 ha (KPA, 2015). Jumlah konflik agraria di sektor kehutanan menurut catatan KPA (2015) mencapai luas 52.176 ha dan berada di peringkat ke dua terbesar setelah sektor perkebunan. Penyelesaian konflik menjadi salah satu permasalahan penting dan prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

Struktur penguasaan tanah yang tidak adil disebut banyak pihak sebagai pangkal sebab konflik. Ini tergambar dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 yang ditetapkan oleh Permenhut 49/2011. Dari total 41,69 juta hektar penggunaan kawasan hutan, 41,01 juta hektar atau 99,5% diperuntukkan bagi perusahaan, seperti HPH, HTI, pelepasan kebun, pinjam pakai tambang. Hanya 0,21 juta hektar atau 0,5% yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal/adat. Data UNDP (2014) menyebutkan bahwa dari aspek tata kelola hutan, proporsi pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan sangat dominan (96%) dibandingkan pengelolaan oleh masyarakat (4%).

Beberapa kasus konflik agraria memberikan pelajaran bahwa jika konflik agraria bersifat eskalatif dan fatalis maka muaranya adalah pelepasan kawasan hutan, sebagaimana terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung pada tahun 2014. Pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain dilakukan tanpa skema distribusi lahan yang jelas dan berkeadilan sehingga berpotensi memicu konflik horisontal. Selain itu, jika benar hutan (tertentu) adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka pelepasan kawasan akan menjauhi kesejahteraan yang diidamkan petani. Jika sebaliknya, maka penguasaan

atau reklaim negara atas areal tertentu sebagai hutan mengkhianati cita-cita terbentuknya negara itu sendiri.

Pelajaran lain dari beragam kasus konflik agraria adalah negara (dalam hal ini pemerintah) harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri yang menuntut akses pertanian terhadap kawasan hutan. Pada gilirannya, sektor kehutanan dianggap sebagai penghambat pembangunan dan kesejahteraan, sehingga harus dinegasikan. Namun demikian, jika terjadi bencana lingkungan, seperti banjir, longor, amukan satwa liar, sektor kehutananlah yang dituding gagal bekerja. Masalah ini akan terus ada, karena pola pertanian ekspansif dan padat modal makin berkembang (Boucher, 2010; Rudel *et al.*, 2009). Selain itu, kondisi kawasan hutan yang berdekatan dengan kawasan hutan juga menjadi rawan konflik. Berdasarkan data Potensi Desa (2014), 2,73% desa (2015 desa) terletak di dalam kawasan hutan dan 25,08% desa (18.488 desa) terletak di tepi kawasan hutan.

Pada konteks pengelolaan kawasan hutan pada skala lokal seperti Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), pelajaran-pelajaran tersebut menjadi penting untuk membangun strategi pengelolaan hutan yang lebih baik. Dari 44 KHDTK yang ada di Indonesia, 34 KHDTK diantaranya dikelola oleh Badan Litbang dan Inovasi Kehutanan. Konflik agraria pada kawasan tersebut menjadi permasalahan yang mengancam eksistensinya. Hal tersebut terjadi disebabkan salah satunya karena minimnya kegiatan penelitian dan minimnya kehadiran pengelola (Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial kawasan Hutan, 2013). Kondisi di KHDTK dapat menjadi laboratorium lapangan dalam mencari solusi terhadap berbagai konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

KHDTK berpotensi mendukung kebijakan pemerintah terkini mengenai pemberian akses perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha pada kawasan hutan. Hal tersebut menjadi bagian penting yang mendorong peran nyata keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lambat berkembang selama ini. Berbagai permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan perhutanan sosial di Indonesia seperti: (1) kegagalan dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumberdaya secara vertikal maupun horisontal; (2) program perhutanan sosial dianggap sebagai program sektoral pemerintah pusat yang kurang didukung pemerintah daerah; (3) ketidaktepatan sasaran; (4) birokrasi pengurusan perijinan yang rumit (Santoso, *et al*., 2015). Penyiapan ijin kawasan perhutanan sosial sampai dengan November 2016 mencapai realisasi 628.615,63 ha

(Ditjen PSKL, 2016) sehingga memerlukan kerja keras untuk dapat mencapai sasaran 12,7 juta ha sampai dengan tahun 2019.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang fokus terhadap isu penguasaan lahan (*land tenure*) dan berusaha menemukenali peluang harmonisasi kepentingan akses pertanian-kelestarian ekosistem, dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan lahan KHDTK Suban Jeriji yang mendukung program perhutanan sosial. Perhutanan sosial menjadi pilihan utama dalam konteks upaya pengelolaan KHDTK Suban Jeriji yang telah dikuasai para pihak. Masalah tenurial di dalam kawasan hutan dapat mengancam keberadaan dan fungsi kawasan hutan bila tidak segera dicarikan solusi. Penelitian ini berupaya untuk merekomendasikan solusi terhadap masalah tenurial yang terjadi pada kawasan hutan untuk dapat dikelola secara berkelanjutan.

Penelitian pada tahun 2017 ini akan merekam berbagai proses sosial dan biofisik yang dilakukan dalam rangka mendorong upaya pengelolaan kembali kawasan hutan yang terkonversi pertanian. Penelitian fokus untuk mengungkap berbagai fakta terkait interaksi masyarakat sekitar KHDTK Suban Jeriji terhadap lahan dan kawasan hutan serta persepsinya terhadap keberadaan KHDTK Suban Jeriji. Pembelajaran dari kasus ini menjadi masukan bagi BP2LHK Palembang dalam upaya menysusun rencana aksi pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Penelitian pada tahun 2017 merupakan penelitian tahun ke-3 dan merupakan penelitian tahun terakhir dalam rangka mengetahui berbagai potensi yang ada di KHDTK Suban Jeriji dan memberikan pilihan pengelolaan kawasan hutan rawan konflik.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah menjadi gamang, bingung dan ragu-ragu ketika harus mengambil sikap dan tindakan terhadap kasus kawasan hutan terkonversi pertanian. Hal itu juga yang terjadi di KHDTK Suban Jeriji. Hasil pengamatan awal menunjukkan nyaris tidak ada lagi lahan yang belum dikuasai para pihak atau belum dikelola. Pengelola KHDTK Suban Jeriji belum menentukan pilihan-pilihan skenario pengelolaan karena bingung untuk memulainya. Kehadiran pengelola KHDTK Suban Jeriji menimbulkan beragam respon dari masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan terhadap lahan tersebut. Data dan informasi mengenai kondisi interaksi masyarakat dengan KHDTK Suban Jeriji belum sepenuhnya diketahui. Respon masyarakat terkait keberadaan pengelola KHDTK Suban Jeriji belum diketahui dengan pasti walaupun hal tersebut cukup penting sebagai

pertimbangan dalam formulasi pendekatan sosial dalam upaya pengelolaan kawasan hutan. Kondisi tata kelola di KHDTK Suban Jeriji sampai dengan saat ini belum diketahui dengan detail. BP2LHK Palembang sebagai pengelola KHDTK Suban Jeriji sampai dengan saat ini belum menentukan langkah-langkah berarti dalam upaya pengelolaan kawasan tersebut. Pertanyaan penelitian tahun ini adalah: ***"bagaimana pilihan rencana pengelolaan KHDTK Suban Jeriji berdasarkan interaksi masyarakat dengan KHDTK Suban Jeriji, kondisi tata kelola saat ini dan demplot kerjasama pengelolaan lahan yang telah dibangun?"***

C. Tujuan dan Sasaran

1. Menganalisis pola pengelolaan kawasan hutan yang terkonversi berdasarkan pembelajaran dari sistem penghidupan dan nafkah masyarakat, serta penguasaan penggunaan lahan di sekitar KHDTK Suban Jeriji;
2. Melanjutkan pembangunan demplot model pengelolaan lahan di KHDTK Suban Jeriji yang adaptif.

D. Luaran

Luaran yang diharapkan adalah diperolehnya skenario pengelolaan KHDTK Suban Jeriji dan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan KHDTK Suban Jeriji selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penelitian ini meliputi aspek sosial dan aspek teknis terkait pengelolaan kawasan hutan terkonversi pertanian berdasrkan sistem penghidupan masyarakat dan penguasaan lahan hutan yang dilakukan. Kombinasi pendekatan sosial dan pendekatan teknis dilakukan dalam pembangunan demplot kerjasama pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Analisis Tata Kelola KHDTK Suban Jeriji yang Terkonversi Pertanian dan Terdegradasi

Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang saat ini mengelola 3 KHDTK untuk tujuan penelitian dan pengembangan di wilayah Sumatera Selatan dengan kondisi yang beragam. KHDTK Benakat merupakan salah satu kawasan yang telah memiliki status penetapan KHDTK sejak tahun 2004 karena merupakan eks-areal kerjasama JICA sejak akhir dekade 1970-an sampai dengan 1990-an. KHDTK Kemampo belum dilakukan penetapan kawasan tetapi sudah dilakukan berita acara tata batas pada tahun 2011. Sedangkan KHDTK Suban Jeriji yang baru dikelola pada akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini belum dilakukan penataan kawasan. Dari ketiga KHDTK tersebut, KHDTK Kemampo cukup aktif dikelola dan digunakan sebagai lokasi penelitian dan pengembangan karena lokasi yang mudah diakses dan dekat dengan kantor BP2LHK Palembang, sekitar 40 km dari kota Palembang. Sedangkan 2 KHDTK lainnya minim kegiatan penelitian dan pengembangan karena jaraknya yang relatif jauh dari kantor BP2LHK Palembang dan keterbatasan sumberdaya untuk pengelolaan. Permasalahan kawasan yang belum ditata batas, kegiatan penelitian yang sporadis dan belum adanya kelembagaan di lapangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak KHDTK di Indonesia (Direktorat Pengukuhan Baplan, 2013). Permasalahan tersebut merupakan sebagian kendala dalam pengelolaan KHDTK yang menjadi beban berat bagi pengelola saat ini.

Berdasarkan kondisi pengelolaan KHDTK di Sumatera Selatan, KHDTK Suban Jeriji saat ini menghadapi permasalahan pengelolaan yang cukup pelik. BP2LHK Palembang baru ditunjuk sebagai pengelola pada akhir tahun 2014 setelah 10 tahun kawasan tersebut tidak ada kejelasan institusi pengelola. Hal ini mengakibakan masalah pembalakan ilegal dan kebakaran hutan yang menghabiskan potensi sumber daya hutan yang ada, yang diikuti oleh penguasaan lahan oleh masyarakat. Konversi hutan menjadi areal pertanian, terutama kebun karet, terjadi secara cepat dalam kurun waktu 10 tahun dibawah penguasaan masyarakat secara bebas. Sebagian besar lahan di KHDTK Suban Jeriji telah dikonversi menjadi kebun karet masyarakat. Semak belukar yang tersisa bahkan telah dikuasai masyarakat. Saat ini sangat sulit untuk menemukan lahan di dalam kawasan tersebut yang belum dikuasai masyarakat yang dapat dijadikan sebagai areal penelitian dan pengembangan tanaman kehutanan.

Secara faktual, hampir seluruh kawasan telah dikuasai oleh masyarakat untuk berbagai penggunaan dan BP2LHK Palembang sebagai pengelola mengalami kesulitan untuk menentukan langkah pengelolaan yang tepat. KHDTK tersebut telah mengalami permasalahan yang cukup rumit ketika diserahkan pengelolaannya kepada BP2LHK Palembang. Instansi pengelola menjadi bingung untuk menentukan upaya pengelolaan yang dapat dilakukan dan berada pada kondisi yang dilematis. Kewenangan untuk mengelola kawasan dibatasi oleh kemampuan sumberdaya untuk mengelola kawasan yang terkait dengan sumberdaya manusia dan kemampuan anggaran yang terbatas. Di sisi lain, penguasaan lahan oleh masyarakat terus terjadi di KHDTK Suban Jeriji, terutama untuk kebun karet.

Identifikasi dan analisis kondisi KHDTK Suban Jeriji menjadi langkah awal untuk memahami kondisi nyata di lapangan dan sebagai bahan untuk menentukan rencana pengeloaan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menjadi pembuka bagi insitusi pengelola dalam menyediakan berbagai data dan informasi terkait kondisi lapangan di KHDTK Suban Jeriji. Penelitian ini menjadi satu-satunya kegiatan penelitian di kawasan tersebut dalam 3 tahun terakhir dengan berbagai keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Penelitian pada tahun ke-3 ini berupaya untuk melengkapi data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dan menganalisis langkah- langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk merumuskan pendekatan pengelolaan yang adaptif.

Penguasaan dan penggunaan lahan di dalam KHDTK Suban Jeriji dilakukan oleh masyarakat yang memiliki beragam karakteristik. Masyarakat yang melakukan penguasaan lahan terdiri dari masyarakat lokal Desa Suban Jeriji, pendatang,dan masyarakat luar Desa Suban Jeriji. Pihak yang disebutkan terakhir cukup sulit ditemui karena mereka tinggal di berbagai daerah dan jarang mengunjungi lokasi. Masyarakat lokal dan pendatang pun seringkali menghindar dan enggan untuk diwawancarai karena kecurigaan terhadap pihak kehutanan. Gambaran karakteristik masyarakat yang menguasai dan mengelola KHDTK Suban Jeriji saat ini berdasarkan hasil survey disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Karakteristik masyarakat yang menguasai lahan KHDTK Suban Jeriji (n=36)

No.	Karakteristik	Satuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Umur (tahun)	20-29	2	5,56
		30-39	7	19,44
		40-49	12	33,33
		50-59	8	22,22
		60-69	6	16,67
		>70	1	2,78
2.	Pendidikan	Tidak sekolah	1	2,78
		SD	23	63,89
		SMP	8	22,22
		SMA	4	11,11
3.	Kependudukan (orang)	Masyarakat lokal	21	58, 33
		Masyarakat pendatang	15	41,67
4.	Pekerjaan	Buruh tani	7	19,44
		Petani	22	61,11
		Karyawan	6	16,67
		Wirausaha	1	2,78
5.	Jumlah tanggungan (orang)	1	4	11,11
		2	4	11,11
		3	11	30,56
		4	10	27,78
		5	3	8,33
		>5	4	11,11
6.	Pengeluaran rumah tangga per bulan (Rp)	≤ 2juta	11	30,56
		>2 juta – 3 juta	14	38,89
		>3 juta – 4 juta	5	13,89
		>4 juta – 5 juta	4	11,11
		> 5 juta	2	5,56
7.	Penguasaan lahan lain di luar KHDTK (orang)	Ya	25	69,44
		Tidak	11	30,56

Sumber: Data primer penelitian (diolah)

Responden yang menguasai lahan di KHDTK Suban Jeriji memiliki karakteristik yang umum ditemui pada masyarakat pedesaan. Sebagian besar responden, 80,56%, berada pada umur produktif antara 20-59 tahun. Tingkat pendidikan formal responden sebagian besar berada pada tingkat SD, 63,89%. Rendahnya tingkat pendidikan formal menjadi pertimbangan penting bagi para pihak untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan permasalahan komunikasi. Sebagian besar responden merupakan masyarakat lokal Desa Suban Jeriji dengan klasifikasi lahir dan atau tinggal di desa lebih dari 20 tahun. Sebagian lainnya merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Sumatera Selatan dan Lampung. Pendatang dari Lampung mulai mengelola lahan di KHDTK Suban Jeriji dalam 5 tahun terakhir karena tertarik dengan murahnya harga

lahan yang ditawarkan oleh rekan dan kerabatnya di Desa Suban Jeriji.

Petani kebun menjadi pekerjaan utama sebagian besar responden dan biasanya masyarakat melakukan pekerjaan lainnya seperti buruh tani dan non-tani, pekerjaan jasa lainnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut seringkali tidak rutin dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi harga jual komoditas getah karet dan kebutuhan rumah tangga responden. Hampir seluruh kebutuhan pokok rumah tangga responden diperoleh dengan cara membeli karena penggunaaan lahan ditujukan utamanya untuk kebun karet sehingga tingkat pengeluaran responden per bulan sebagian besar berada pada rentang Rp. 1 juta – Rp. 3 juta, yaitu sebesar 69,45%. Pendekatan pengeluaran rumah tangga digunakan karena lebih memudahkan responden untuk menghitungnya dan relatif sama setiap bulannya. Sedangkan untuk pendekatan pendapatan relatif berubah-ubah tergantung sumber pendapatan dan harga jual komoditas getah karet yang fluktuatif.

Tabel 2. Deskripsi penguasaan lahan oleh masyarakat di KHDTK Suban Jeriji

No.	Karakteristik	Satuan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Lama menguasai lahan (tahun)	1-3	8	22,22
		4-6	22	61,11
		7-9	3	8,33
		10-12	3	8,33
2.	Luas lahan dikuasai (ha)*	≤ 2	13	36,11
		>2-3	8	22,22
		>3-4	2	5,56
		>4-5	3	8,33
		>5-6	4	11,11
		>6	6	16,67
3.	Jumlah bidang lahan dikuasai (bidang)	1	22	61,11
		2	6	16,67
		3	7	19,44
		4	1	2,78
4.	Kondisi penutupan lahan saat ini	Kebun karet, palawija	23	63,89
		Belum dikelola, kebun gagal, lahan terlantar	13	36,11
5	Cara menguasai lahan	Membuka sendiri	22	61,11
		Membeli lahan yang telah ditebas	5	13,89
		Membeli kebun karet	2	5,56
		Membuka sendiri dan membeli lahan yang telah ditebas	2	5,56
		Membuka sendiri dan membeli kebun karet	1	2,78
		Hasil bagi lahan dari	2	5,56

		kerjasama pengelolaan lahan		
		Membei lahan yang telah ditebas dan membeli kebun karet	1	2,78
		Membuka sendiri dan hasil bagi lahan kerjasama pengelolaan lahan	1	2,78
6.	Akses menuju lahan	Berada di pinggir jalan raya penghubung desa	7	19,44
		Bisa diakses mobil	8	22,22
		Hanyabisa diakses motor	21	58,33

Sumber: Data Primer Penelitian (Diolah)

Kebun karet menjadi penggunaan lahan yang dominan di dalam KHDTK Suban Jeriji. Hal ini karena getah karet telah menjadi komoditas utama sumber penghidupan masyarakat lebih dari 3 dekade. Walaupun sawit di sekitar desa tetangga, seperti di Desa Air Talas, telah lama berkembang namun masyarakat Desa Suban Jeriji masih mengandalkan karet sebagai tanaman utama dalam pengelolaan lahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini: (1) Aspek teknik budidaya karet telah dikuasai dibandingkan sawit; (2) Pasar karet telah terbentuk dengan baik dibandingkan sawit; (3) Modal yang dibutuhkan untuk budidaya karet lebih kecil dibandingkan sawit; (4) Produk getah karet lebih tahan lama dibandingkan sawit yang perlu segera dijual; (5) Budidaya kelapa sawit rentan terhadap hama penyakit dan memerlukan alokasi waktu budidaya lebih intensif dibandingkan karet. Walaupun harga getah karet mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir namun masyarakat masih mempertahankan kebun karet yang dikelolanya dan pembangunan kebun karet masih dilakukan masyarakat. Hasil studi Syarifa, et al. (2016) juga menegaskan bahwa masyarakat telah turun temurun mengelola karet sehingga enggan untuk mengambil risiko untuk mengganti karet dengan jenis tanaman lain.

Kebun karet merupakan salah satu penanda kesejahteraan bagi masyarakat. Semakin luas kebun karet yang dikelola mengarah pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini yang mendorong masyarakat cenderung terus melakukan perluasan kebun karet walaupun mereka telah mengelola kebun karet yang cukup luas. Luasnya kebun karet yang dikelola juga dapat meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di tengah masyarakat lainnya. Kebun karet juga merupakan bentuk akumulasi aset yang relatif

memiliki manfaat jangka panjang yang pengelolaannya dapat diteruskan pada generasi selanjutnya. Selain itu, getah karet menjadi produk yang aman dan fleksibel dalam pengggunaannya yang dapat berfungsi sebagai tabungan bagi masyarakat desa. Turunnya harga getah karet sejak tahun 2014 memang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat, daya beli petani, dan kemampuan petani karet untuk berinvestasi di Sumatera Selatan (Syarifa, et al., 2016) namun karet tetap diminati oleh masyarakat di sekitar KHDTK Suban Jeriji sebagai sumber kesejahteraan.

Saat ini, kebun karet yang dibangun dan dikelola masyarakat di KHDTK Suban Jeriji terus meluas ke berbagai sisi kawasan. Ketika sekitar 10-15 tahun lalu membangun kebun karet dilakukan secara bertahap dan hati-hati karena khawatir digusur pihak kehutanan maka saat ini pembangunan kebun karet dilakukan secara terang-terangan. Masyarakat bahkan meyakini bahwa semakin banyak orang yang berkebun dan semakin luas kebun karet yang dibangun maka kemungkinan penggusuran lahan oleh pihak kehutanan semakin kecil. Luasnya kebun karet yang dikuasai orang luar juga menjadi rujukan bagi masyarakat lokal dan pendatang untuk terus berkebun di dalam KHDTK Suban Jeriji. Posisi dan peran masyarakat semakin menguat dalam penguasaan lahan kawasan hutan seiring dengan melemahnya kehadiran pengelola di dalam kawasan hutan negara (Sita, 2014; Maryudi, *et al.*, 2016). Hal ini menunjukkan pentingnya perlakuan dan tindakan aparat berwenang dan pengelola yang adil terhadap berbagai pihak yang menguasai lahan kawasan tersebut.

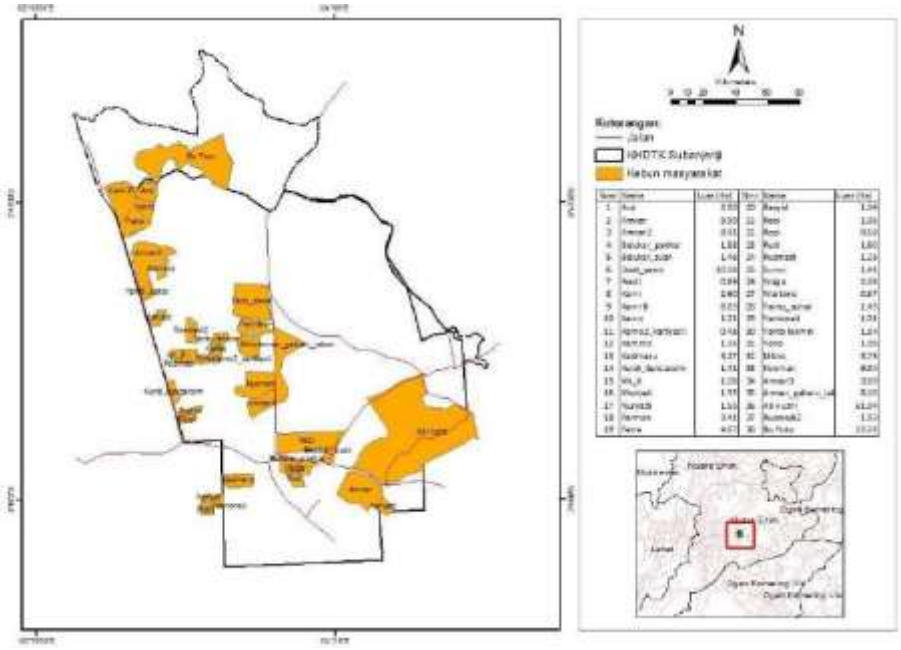

Gambar 1. Peta sebagian penguasaaan lahan di KHDTK Suban Jeriji

Sistem penghidupan masyarakat di sekitar KHDTK Suban Jeriji yang berbasis lahan dengan komoditas utama karet telah menjadi identitas sosial ekonomi dan budaya yang penting bagi masyarakat Suban Jeriji. Lebih dari 5 dekade karet telah menjadi komoditas yang terbukti mampu memperbaiki tingkat penghidupan masyarakat. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh pengelola KHDTK sehingga pendekatan pengelolaan yang memungkinkan saat ini adalah bersahabat dengan kebun karet yang ada. Karet tetap menjadi pertimbangan penting dalam setiap rencana dan kegiatan pengelolaan kawasan yang akan dilakukan.

Selain kebun karet, sebagian kecil masyarakat masih membiarkan lahannya dalam bentuk belukar dan bekas kebun gagal. Lahan ini dibiarkan karena alasan: (1) masyarakat belum memiliki modal untuk mengelola lahan; (2) belum dapat mengalokasikan waktu untuk mengelola lahan; (3) bentuk spekulasi yang sewaktu-waktu dapat dijual. Dari alasan-alasan tersebut, masyarakat menganggap bahwa penguasaan lahan di dalam KHDTK tidak akan menimbulkan permasalahan di masa depan. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa dengan semakin luasnya lahan kebun karet yang dibangun maka kecil kemungkinan penggusuran lahan akan terjadi.

Masyarakat menyadari bahwa lahan yang dikuasai dan dikelolanya berada di dalam kawasan hutan yang mereka sebut “lahan INHUTANI” yang tidak dikelola lagi. Sebagian besar responden (91,67%) mengetahui bahwa lahan yang saat ini dikelolanya sebelumnya merupakan lahan yang dikelola PT INHUTANI. Sebagian besar responden (61,11%) bahkan mengetahui dan pernah menyaksikan aktivitas pengelolaan hutan PT. INHUTANI pada lahan yang dikelolanya saat ini. Sebagian responden (25%) pernah terlibat sebagai pekerja ketika PT INHUTANI melakukan pengelolaan hutan pada lahan yang mereka kuasai saat ini. Walaupun demikian, mereka tetap membuka kebun karet di dalam kawasan hutan karena lahannya tidak produktif, tidak ada pengelolaan, dan banyaknya orang luar yang mengambil manfaat dari kawasan hutan itu.

Lamanya waktu transisi pengelolaan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui dengan pasti pengelola kawasan terkini. Hasil survey menunjukkan bahwa 96,67% responden tidak mengetahui pihak kehutanan yang mengelola lahan yang mereka kuasai sehingga masyarakat masih menyebutnya dengan lahan INHUTANI. Aparat desa selama ini pun tidak mengetahui mengenai status pengelolaan KHDTK Suban Jeriji sehingga masyarakat menyatakan belum pernah ada teguran dari aparat desa terkait lahan eks PT. INHUTANI yang dikuasai dan dikelola masyarakat. Teguran

pernah diterima oleh 22,22% responden dari aparat kehutanan yang melakukan patroli dan kunjungan ke sekitar Suban Jeriji sebelum BP2LHK Palembang ditunjuk sebagai pengelola.

Tabel 3. Pernyataan pendapat responden terkait keberadaan KHDTK Suban Jeriji

No.	Pernyataan	Pendapat responden	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Responden mengetahui bahwa lahan yang dikelola merupakan lahan eks INHUTANI	Ya	33	91,67
		Tidak	3	8,33
2.	Responden pernah mengetahui atau melihat kondisi kawasan hutan ketika dikelola PT. INHUTANI	Ya	22	61,11
		Tidak	14	38,89
3.	Responden pernah terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan oleh PT. INHUTANI sebelumnya	Ya	9	25
		Tidak	27	75
4.	Responden mengetahui pengelola kawasaan hutan eks INHUTANI saat ini	Ya	1	2,78
		Tidak	35	97,22
5.	Responden pernah ditegur aparat kehutanan terkait pengelolaan lahan eks INHUTANI yang dilakukannya	Ya	8	22,22
		Tidak	28	77,78

Sumber: Data Primer Penelitian (Diolah)

Fakta-fakta tentang kondisi lapangan dan sosial di KHDTK Suban Jeriji menunjukkan bahwa kawasan hutan ini memiliki sejumlah tantangan pengelolaan yang perlu disadari oleh pengelola. Kondisi kawasan tersebut yang sebagian besar sudah dikuasai oleh masyarakat ketika BP2LHK Palembang ditunjuk menjadi pengelola merupakan fakta yang dihadapi saat ini untuk segera dilakukan aksi lapangan. Kegiatan rutin yang bersifat *"business as usual"* dapat memperburuk kondisi yang ada dan menjadikan posisi negara yang semakin lemah dalam pengelolaan kawsan hutan.

Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dalam upaya pengelolaan KHDTK Suban Jeriji, yaitu:

1. Kondisi sebagian besar kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat. Inventarisasi secara detail kondisi penguasaan lahan yang dilakukan masyarakat beserta klasifikasi penutupan lahan dan klasifikasi pelaku penguasaan lahan merupakan bagian dari data mendasar yang diperlukan untuk memetakan kondisi biofisik dan sosial KHDTK Suban Jeriji.
2. Status pemantapan kawasan hutan yang masih lemah. Saat ini kawasan hutan

baru berstatus penunjukkan untuk tujuan khusus penelitian, pengembangan dan areal produksi benih. Kondisi tersebut baru berada pada tahap awal pemantapan kawasan hutan dan memerlukan proses lanjutan untuk ditetapkan sebagai KHDTK. Proses ini memerlukan sumberdaya dan waktu. Berdasarkan data Badan Litbang dan Inovasi tahun 2017, dari 34 KHDTK yang dikelola dengan fungsi penelitian dan pengembangan, hanya 13 KHDTK (38,235%) yang sudah mantap statusnya melalui penetapan kawasan hutan. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Litbang dan Inovasi Kehutanan secara nasional untuk melakukan proses pemantapan KHDTK.

3. Belum adanya arah pengelolaan KHDTK. Rencana pengelolaan KHDTK belum dimiliki oleh pengelola sehingga arah pengelolaan berdasarkan kondisi faktual di lapangan belum jelas. Rencana pengelolaan dapat menjadi rujukan dan arahan dalam kegiatan pengelolaan sehingga dapat diketahui target-target pengelolaan kawasan. Rencana pengelolaan juga belum dimiliki oleh KHDTK lainnya yang dikelola BP2LHK Palembang. Hal ini yang mengakibatkan tidak berfungsinya KHDTK untuk prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan, walaupun ada hanya sporadis dan tidak terpadu.
4. Keterbatasan anggaran pengelolaan KHDTK. Dukungan anggaran yang minim menjadikan KHDTK belum dapat dikelola sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kebijakan anggaran BP2LHK Palembang yang turun berimbas pada porsi anggaran pengelolaan KHDTK yang juga terus menurun. Penunjukkan KHDTK Suban Jeriji tidak disetai dengan dukungan anggaran yang memadai. Belum ada upaya untuk mengatasi kekurangan anggaran ini karena permasalahan anggaran umum dihadapi oleh kegiatan lainnya dan anggaran diprioritaskan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan topik dan isu yang telah ditetapkan.
5. Keterbatasan sumberdaya pengelola KHDTK. Saat ini hanya ada satu orang tenaga kontrak pengelola KHDTK Suban Jeriji karena keterbatasan anggaran yang ada. Keberadaan sumberdaya manusia (sdm) pengelola dirasakan sangat kurang untuk menangani KHDTK. Tugas tenaga kontrak yang hanya satu orang belum didefinisikan secara jelas sehingga tidak memiliki standar pekerjaan yang perlu dilakukan. Selain sumberdaya tenaga pengelola, infrastruktur pendukung seperti bangunan yang menunjukkan keberadaan pengelola belum dimiliki sampai dengan saat ini.

Dalam konteks pengelolaan KHDTK Suban Jeriji yang lahannya telah dikonversi untuk areal pertanian dan perkebunan oleh masyarakat, tantangan utamanya adalah mempertemukan kepentingan antara penguasa lahan dan pengelola kawasan hutan. Hal ini membutuhkan komitmen dan konsistensi para pihak yang terlibat untuk mulai menata pengelolaan kawasan hutan. Pengelolaan yang melibatkan para pihak terkait menjadi hal mendasar dalam upaya mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyelaraskan pengelolaan sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Identifikasi para pihak terkait menjadi hal penting dalam menyusun database untuk menentukan langkah-langkah pengelolaan yang dapat dilakukan. Selain itu, memperkuat kapasitas pengelola KHDTK menjadi komponen penting dalam menata pengelolaan KHDTK Suban Jeriji.

Identifikasi aktor terkait KHDTK Suban Jeriji

Kondisi yang terjadi saat ini di KHDTK Suban Jeriji menunjukkan kompleksitas permasalahan kawasan hutan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini juga merupakan muara dari lemahnya tata kelola hutan yang berdampak pada semakin menurunnya fungsi kawasan hutan (Sumanto dan Sujatmoko, 208; Sita, 2014; Maryudi, *et al.*, 2016,). Identifikasi aktor terkait KHDTK Suban Jeriji dilakukan untuk mengetahui peran dan potensi peran para aktor untuk penataan pengelolaan kawasan hutan. Berikut ini adalah aktor-aktor yang terkait dengan KHDTK Suban Jeriji:

a. **Masyarakat yang menguasai dan mengelola hutan**. Hal ini dibedakan atas masyarakat lokal Desa Suban Jeriji, masyarakat pendatang, dan masyarakat dari luar Desa Suban Jeriji. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktor ini memiliki kekuatan dalam pengelolaan lahan kawasan hutan walaupun secara hukum lahan tersebut berada di bawah pengelolaan BP2LHK Palembang. Kekuatan masyarakat ini dalam menguasai dan mengelola hutan cukup beragam dalam hal penguasaan luas, kekuatan modal dan pengaruh yang memerlukan pertimbangan yang cukup teliti untuk melakukan klasifikasi.
b. **Aparat Desa Suban Jeriji**. Kekuatan adminstratif aparat desa dalam arti positif dapat mengarahkan masyarakat desa dalam melakukan aktivitas pengelolaan lahan. Pada konteks pembangunan wilayah desa, aparat desa, khususnya kepala desa, merupakan tokoh sentral yang mempengaruhi masyarakat desa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait kondisi sumberdaya yang ada di sekitarnya. Kekuatan dan pengaruh yang dimiliki kepala desa menjadi penghubung kepentingan dalam

pengelolaan KHDTK Suban Jeriji antara pengelola dengan masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki kepala desa da aparat desa dapat mempengaruhi langkah-langkah pihak luar yang mengelola KHDTK Suban Jeriji.

c. **BP2LHK Palembang** sebagai pengelola KHDTK Suban Jeriji yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan tersebut. Instansi ini menjadi aktor kunci yang akan menggerakkan kegiatan pengelolaan kawasan hutan.

d. **Penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan**. Pihak ini memiliki potensi sebagai ujung tombak pembinaan petani di lapangan untuk dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas petani dalam rangka pengelolaan terpadu kawasan hutan.

d. **Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suban Jeriji**. Peran KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak menjadi penting terkait kewenangan pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik. Hal ini akan ditelusuri lebih lanjut.

e. **Dinas Pertanian/Perkebunan**. Instansi ini berperan dalam menjajagi peluang integrasi program pertanian/perkebunan ke dalam pengelolaan kawasan hutan kolaboratif.

g. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**. Instansi dalam lingkup UPT ini menjadi aktor yang dapat memberikan fasilitasi dalam rangka pengelolaan KHDTK Suban Jeriji partisipatif dan adaptif.

Aktor (stakeholder) yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan KHDTK Suban Jeriji saat ini adalah BP2LHK Palembang, masyarakat penguasa dan pengelola kawasan hutan dan aparat Desa Suban Jeriji. Ketiga pihak ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kawasan hutan. Namun kewenangan (pengaruh) yang dimiliki para pihak tersebut berbeda dalam konteks legalitas pengaruh yang dimiliki. Secara legal, BP2LHK Palembang memiliki kewenangan legal yang sebagai pengelola kawasan hutan negara, namun secara faktual masyarakat penguasa dan pengelola kawasan hutan memiliki pengaruh yang kuat. Berbeda dengan hasil penelitian Wakka (2014) yang menempatkan masyarakat sebagai pengikut (*crowd*) dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah di KHDTK Mengkendek. Aparat Desa Suban Jeriji memiliki kewenangan administrasi di sekitar wilayah KHDTK dan dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan kawasan hutan. Namun berdasarkan pembelajaran kasus penguasaan lahan yang dilakukan, kewenangan aparat

desa menjadi lemah karena tidak memiliki integritas dalam memimpin desa. Menurut Reed, *et al.* (2009), stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi merupakan stakeholder kunci yang menjadi prioritas dilibatkan dalam suatu pengelolaan.

Aktor-aktor lainnya dalam pengelolaan KHDTK Suban Jeriji menjadi pendukung dalam rangka pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Hal ini karena identifikasi dan analisis mendalam tentang peran para aktor belum dilakukan secara mendalam. Saat ini baru diidentifikasi potensi keterlibatan para stakeholder tersebu dalam pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Posisi stakeholder bisa saja nantinya menjadi subyek, aktor kunci dan aktor pendukung berdasarkan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan yang dilakukan (Reed, *et al.*,2009; Wakka, 2014).

Potensi upaya perbaikan dan penguatan tata kelola lokal KHDTK Suban Jeriji

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa ada hal-hal mendasar dan penting yang perlu segera dilakukan dalam upaya menata pengelolaan KHDTK Suban Jeriji oleh pihak pengelola, BP2LHK Palembang. Sebagian besar masyarakat dan bahkan aparat desa menyadari bahwa lahan eks INHUTANI merupakan bagian dari kawasan hutan yang tidak boleh dikelola secara bebas dan sewaktu-waktu kawasan tersebut dapat dikelola kembali oleh pihak kehutanan. Namun mereka tidak mengetahui pihak kehutanan yang memiliki kewenangan terhadap lahan eks INHUTANI tersebut. Tidak adanya kejelasan pengelola menjadikan kawasan tersebut semakin terbuka aksesnya untuk dikuasai secara bebas oleh berbagai kalangan. Berdasarkan analisis tentang keberadaan KHDTK Suban Jeriji, berikut merupakan beberapa langkah awal yang dilakukan:

1. Melakukan konsolidasi internal BP2LHK Palembang untuk membangun kebersamaan dan berbagi peran tanggung jawab dalam upaya menata pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Pelibatan para pihak dari berbagai seksi, peneliti dan staf lainnya dalam mengkomunikasikan kondisi kawasan hutan menjadi penting untuk

dilakukan. KHDTK Suban Jeriji menjadi tanggung jawab bersama berbagai komponen yang ada di BP2LHK Palembang agar dapat ditata dan dikelola.

2. Melakukan sosialisasi keberadaan pengelola dan fungsi KHDTK Suban terutama kepada masyarakat dan aparat Desa Suban Jeriji serta pihak-pihak lainnya yang berada di sekitar kawasan huan tersebut. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal dalam bentuk pertemuan kelompok di tingkat dusun. Sosialisasi dilakukan secara teratur dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk diskusi untuk memahami dengan baik kondisi di lapangan dan mengakomodasi persepsi dan harapan masyarakat terkait KHDTK Suban Jeriji.
3. Membangun komunikasi dengan para pihak pada level pemerintahan yang berbeda (kecamatan dan kabupaten) untuk mengetahui dinamika pembangunan yang terjadi dan menjelaskan posisi KHDTK Suban Jeriji dan perannya dalam pembangunan daerah.
4. Membangun jejaring kerja dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PSKL, eselon I lainnya dalam rangka koordinasi, konsultasi, akselerasi pengelolaan KHDTK dan peluang- peluang pilihan pengelolaan yang dapat dilakukan.

Komunikasi yang konstruktif merupakan langkah mendasar untuk membangun jejaring kerja dan mengidentifikasi lebih detail para pihak yang terkait dengan KHDTK Suban Jeriji. Dalam pengelolaan suatu kawasan hutan faktor komunikasi dengan berbagai pihak terkait menjadi langkah awal krusial yang perlu dilakukan (Sumanto dan Sujatmoko, 2008; Sardjono, 2013; Wakka, 2014; Surati, 2014; Tanjung, 2016). Hal ini perlu dilakukan kepada berbagai pihak dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sehingga dapat diketahui berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kawasan saat ini.

Komunikasi dibangun untuk mengetahui lebih detail mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan sebagai data informasi untuk menyusun konsep rencana pengelolaan. Nugroho (2013) juga menekankan pentingnya penataan mekanisme inter-relasi antar aktor sebagai upaya perbaikan tata kelola yang mencakup: (1) kebersamaan, partisipatif dan non aliensi; (2) tanpa tekanan; (3) penghormatan terhadap posisi dan peran masing-masing aktor yang terlibat; (4) penataan peran dan tanggung jawab; (5) kepatuhan terhadap kesepakatan dan hukum. Komunikasi dan hubungan antar aktor dibangun untuk menumbuhkan kepercayaan antar aktor dalam mencari pilihan pengelolaan yang adaptif bagi berbagai pihak.

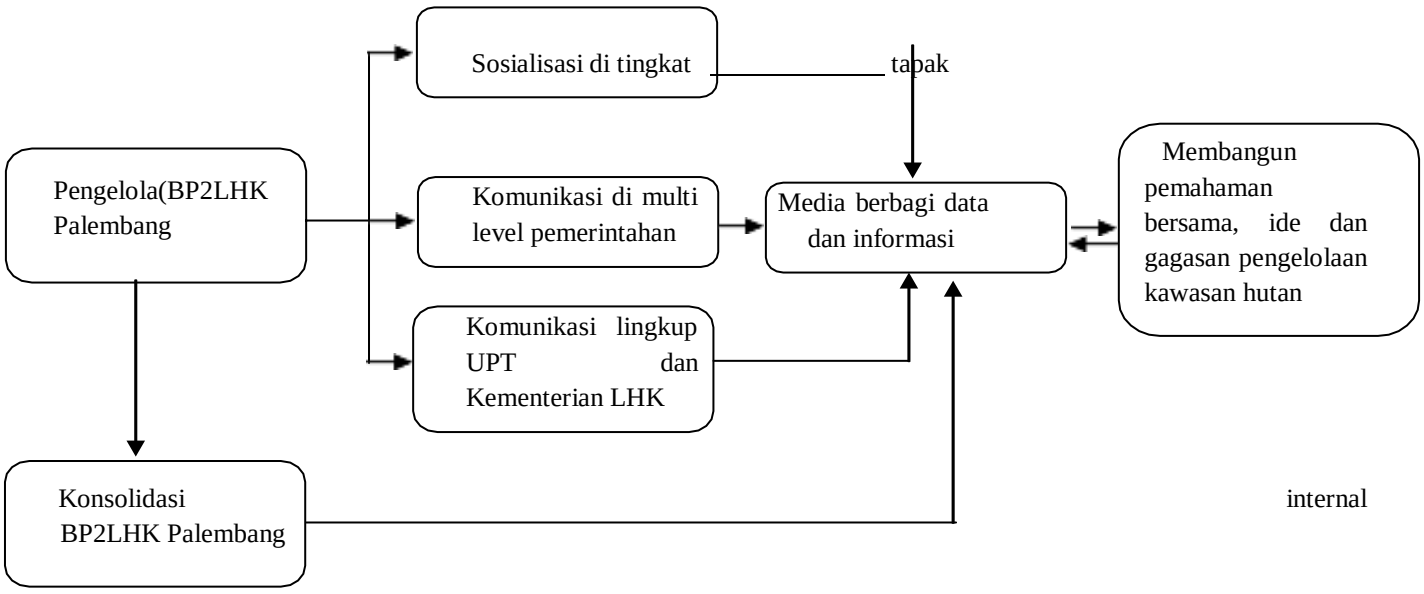

Gambar 2. Langkah awal membangun komunikasi dengan para pihak dalam rangka upaya penataan pengelolaan KHDTK Suban Jeriji

Masyarakat di dalam dan sekitar KHDTK Suban Jeriji merupakan pelaku utama pengelolaan kawasan secara faktual di lapangan. Masyarakat mengandalkan pada hasil getah karet sebagai sumber penghidupan utama. Keberlanjutan hasil, nilai sosial ekonomi yang menguntungkan, penguasaan teknis budidaya merupakan beberapa faktor yang menjadikan komoditas ini tetap unggul. Masyarakat berupaya untuk mempertahankan kebun karet yang ada di dalam KHDTK Suban Jeriji. Hal ini berarti masyarakat akan tetap bertahan di dalam kawasan dengan mengambil resiko pengelolaan yang akan dilakukan pengelola. Dalam kondisi saat ini, tindakan represif dengan mengusir masyarakat dari dalam KHDTK bukan merupakan pilihan

yang bijak dan bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang semakin pelik dan membutuhkan sumberdaya yang cukup besar. Pendekatan pengelolaan bersama antara penguasa lahan dan pengelola kawasan hutan merupakan pilihan "*win win management".*

Penguasa dan pengelola lahan di dalam KHDTK Suban Jeriji secara umum akomodatif terhadap keberadaan pengelola dari pihak kehutanan dan menghendaki adanya upaya yang solutif dalam pengeloaan bersama kawasan hutan. Hal tersebut menunjukkan peluang pengelolaan bersama KHDTK Suban Jeriji cukup terbuka karena masyarakat penguasa dan pengelola lahan bersedia untuk kerjasama. Selain itu, masyarakat menyadari dan mengakui bahwa lahan yang dikuasai dan dikelolanya merupakan kawasan hutan negara yang sebenarnya tidak boleh dikelola sewenang-wenang. Penguasaan dan pengelolaan lahan relatif belum berlangsung lama, antara 1-17 tahun, masih belum berganti generasi, sehingga ikatan sejarah dan kepemilikan lahan belum lama dan dapat ditelusuri.

Respon masyarakat terkait keberadaan pengelola hutan memang cukup beragam dan sebagian besar mempertanyakan berbagai hal terkait kepentingan masyarakat di KHDTK Suban Jeriji. Hal ini perlu dipahami oleh pengelola sebagai informasi awal dalam merencanakan kegiatan pengelolaan. Terkait upaya pengelolaan bersama KHDTK Suban Jeriji, berikut adalah beberapa isu yang berkembang di masyarakat, yaitu :

1. siapa lembaga/institusi kehutanan yang mengelola KHDTK Suban Jeriji saat ini?
2. bagaimana keberlanjutan lahan yang telah dikuasai dan dikelola masyarakat?
3. konsep kerjasama pengelolaan seperti apa yang ditawarkan?
4. apakah akan ada perlakuan yang sama antara masyarakat yang menguasai dan mengelola lahan dalam skala luas dengan skala kecil, antara masyarakat lokal dengan masyarakat dari luar?
5. apakah sama perlakuan yang diberikan pada lahan yang bekas kebun gagal, alang-alang, semak belukar dengan lahan kebun karet?
6. apa manfaat bila mengikuti kerjasama pengelolaan lahan?

7. jenis tanaman apa yang ditawarkan pihak kehutanan?
8. apakah ada pembinaan dan bantuan dari pengelola dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan?
9. apa hak dan kewajiban masyarakat dalam melakukan kerjasama?
10. berapa lama masa kerjasama pengelolaan lahan dan bagaimana kelanjutannya?
11. apakah pengelolaan lahan bisa dilanjutkan oleh anak dan kerabat?
12. Apakah ada batgasan lahan yang dikuasai dan dikelola masyarakat serta bagaimana pengaturannya?
13. apakah kerjasama bisa melibatkan pihak lain seperti pertanian, perkebunan dan peternakan?
14. apakah kerjasama memerlukan kesepakatan tertulis?

Isu-isu yang ada akan terus berkembang sejalan dengan dinamika yang dihadapi di lapangan. Penguatan dan pemutahiran *database* KHDTK Suban Jeriji menjadi prioritas penting sebelum dilakukan langkah-langkah lanjutan dalam upaya pengelolaan KHDTK.

Konsep pengelolaan bersama kawasan hutan atau lebih dikenal sebagai pengelolaan hutan kolaboratif menjadi skenario yang ditawarkan dalam pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Pengelolaan hutan kolaboratif berupaya untuk mengakomodasi kepentingan stakeholder dalam pengelolaan hutan tanpa melupakan keberadaan , fungsi dan manfaatnya yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pengelola dan permasalahan yang dihadapi oleh KHDTK Suban Jeriji menjadikan pengelolaan kolaboratif menjadi pilihan yang mungkin untuk diimplementasikan. Pengelolaan kolaboratif memperhatikan proses dan membutuhkan waktu yang panjang namun mampu memberikan langkah yang solutif (Carter dan Gronow, 2005; Berkes, 2009; Aliadi, 2011; Nistyantara, 2011; Ming'ate *et al*., 2014; Nurrochmat, *et al.*, 2017). Pembelajaran-pembelajaran dari berbagai proses pengelolaan kolaboratif dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan KHDTK Suban Jeriji.

Pengelolaan kolaboratif KHDTK Suban Jeriji dapat menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan perhutanan sosial berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016. Berdasarkan aturan tersebut, pola kemitraan dapat dibangun di KHDTK Suban Jeriji dengan memperhatikan beragam kondisi lahan yang dikuasai dan dikelola masyarakat serta luasan lahan yang dikuasai. Selain itu, pengelolaan KHDTK secara kolaboratif dapat menjadi *show window* bagi Balai Litbang LHK Palembang yang dapat diadopsi bagi pengelolaan kawasan hutan kolaboratif di daerah lain yang secara regional memiliki kondisi yang serupa.

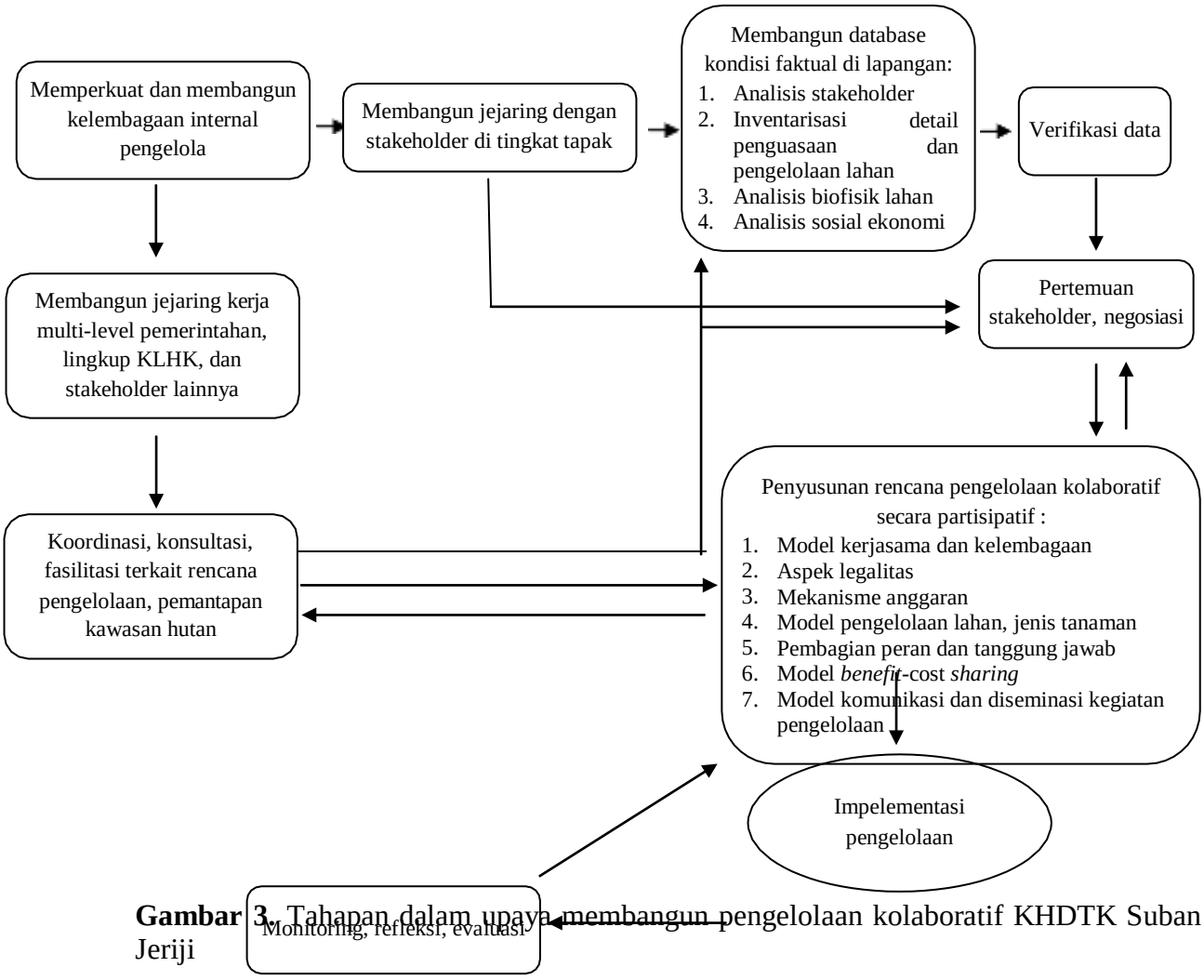

Gambar 3. Tahapan dalam upaya membangun pengelolaan kolaboratif KHDTK Suban Jeriji

Bersahabat dengan getah karet dalam menyusun konsep pengelolaan partisipatif kawasan hutan menjadi pertimbangan yang penting. Konsep pengelolaan partispatif yang ditawarkan mempertimbangkan berbagai jenis penggunaan lahan dan kondisi kebun karet yang mendominasi KHDTK Suban Jeriji. Pola kerjasama pengelolaan lahan yang mengakomodasi keberadaan karet dan melakukan introduksi jenis-jenis tanaman produktif lainnya, termasuk tanaman kehutanan menjadi bentuk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Diversifikasi jenis komoditas di lahan menjadi pemungkin yang bisa diterapkan dalam pengelolaan KHDTK Suban Jeriji yang terkonversi saat ini. Beberapa petani telah mencoba pola tumpangsari sayuran dan palawija di sela-sela tanaman karet muda dengan hasil yang memuaskan. Namun hal itu hanya bertahan 2-3 tahun saja sampai dengan tajuk tanaman karet tertutup. Hal ini memerlukan kajian lanjutan mengenai pola tanam yang sesuai. Selain itu, pasar komoditas palawija dan sayuran masih terbatas di sekitaran desa dan belum mampu berkembang karena kuantitas produksinya yang belum berkembang. Selain itu, kemampuan petani untuk memasarkan hasil produksi masih terbatas. Pembinaan dan pendampingan sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitas petani dalam budidaya dan pemasaran.

Diversifikasi tanaman dengan tanaman kehutanan yang bersifat penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga berpotensi untuk dapat dikembangkan. Penawaran berbagai pola kerjasama dengan berbagai variasi jenis tanaman prospektif dapat menjadi pilihan yang dapat dikonsultasikan dan dikembangkan bersama pihak terkait. Aspek pengaturan kesepakatan kerjasama pengelolaan kawasan hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi penggunan lahan yang ada, kesepakatan hak dan kewajiban dan mekanisme bagi hasil yang adil. Karaktristik umum masyarakat petani di sekitar KHDTK Suban Jeriji merupakan petani kebun yang cenderung bergantung pada komoditas tunggal, yaitu karet. Diversifikasi produk dari tanaman di lahan, terutama palawija dan sayuran, memerlukan upaya yang cukup intensif dalam

pengelolaan sehingga tidak semua petani kebun mau melakukannya. Dalam kondisi ini, pola penggunaan lahan campuran dengan tanaman kehutanan penghasil kayu dan jenis HHBK berpotensi untuk dikembangkan. Keberadaan tanaman kehutanan juga menjadi penanda identitas KHDTK Suban Jeriji.

Pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat saat ini belum dilakukan secara berkelompok. Tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan lahan masih dilakukan secara individu. Fasilitasi kegiatan pertanian secara berkelompok diperlukan untuk meningkatkan kapasitas petani dan meningkatkan posisi tawar petani dalam dalam berbagai kondisi. Saat ini sebagian petani telah membentuk kelompok tani terkait penjualan getah karet, namun belum dapat memfasilitasi petani secara umum dalam hal teknis pengelolaan kebun.

Berdasarkan kondisi yang ada, pengelolaan KHDTK Suban Jeriji dapat diarahkan pada litbang hasil hutan bukan kayu dan agroforestri yang dilakukan secara kolaboratif dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pengelolaan yang aktif menjadi hal penting yang saat ini perlu segera dilakukan. Konsep pengelolaan yang implementatif menjadi hal mendasar untuk menjadi prioritas yang diperlukan saat ini.

B. Pembangunan Demplot Pengelolaan Lahan Adaptif di KHDTK Suban Jeriji

Pembelajaran dari budidaya Ganitri (*Elaeocarpus* spp.) sebagai tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Alokasi penggunaan lahan kering produktif oleh masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Muara Enim adalah perkebunan karet dan sawit, serta tanaman pertanian dengan luasan yang relatif sedikit dan hanya spot-spot saja. Pengembangan tanaman pertanian (palawija) tersebut cenderung dilakukan pada lahan dengan tanaman karet muda sebagai upaya pemanfaatan ruang kosong.

Saat ini mulai dikembangkan budidaya ganitri, khususnya di Benakat Kabupaten PALI yang telah di mulai sejak 12 tahun yang lalu dan saat ini luasannya sudah mencapai puluhan hektar, tetapi pelakuknya masih

terbatas, mengingat pasarnya masih tertutup. Pada awalnya, budidaya ganitri tersebut ditujukan sebagai upaya uji coba kesesuaian lahan yang dilakukan oleh seorang praktisi yang sudah berpengalaman mengembangkan jenis ini di Jawa. Upaya uji coba ini memancing beberapa masyarakat turut menanamnya, walaupun masih terbatas hanya beberapa batang di halaman rumah atau kebunnya.

Lahan yang dijadikan sebagai lokasi penanaman umumnya berasal dari hutan skunder atau kebun karet tua, tetapi ditemukan juga petani yang mengganti tanaman karet produktifnya dengan tanaman ganitri. Lahan pertanaman ganitri di Benakat umumnya berada pada ketinggain tempat 70
– 130 mdpl, memiliki topografi datar sampai bergelombang dengan kelerengan kurang dari 10 % , jenis tanah podsolik merah kuning, struktur tanahnya liat dengan porositas yang termasuk rendah, serta memiliki Ph antara 4 – 5. Kondisi tersebut relatif masih dalam toleransi persayaratan tumbuh tanaman ganitri dan Sumatera merupakan salah satu sebaran alami dari tanaman ini (Heyne, 1987).

Bahan perbanyakan yang digunakan adalah bibit sambungan atau tempel mata tunas. Batang bawah umunya menggunakan jenis ganitri lokal yang lebih adaptif, mudah diperoleh dan murah, biasanya berasal dari kebumen, cilacap, purworejo atau daerah lainnya di Jawa. Sementara mata tunas yang digunakan sebagai entres adalah genitri yang telah diseleksi dan memiliki keunggulan tidak hanya produktivitas saja, tetapi juga marketable atau jenis-jenis yang dibutuhkan pasar dan bernilai ekonomi tinggi. Beberapa klon unggul yang telah ditanaman antara lain: kalipuru, karsino, medana, bodrex dan lainnya. Sampai saat ini pengadaan bahan tanaman yang dikembangkan di Benakat masih didatangkan dari Jawa, belum ada penangkar bibit ganitri di lokasi.

Pola tanam umum yang digunakan dalam budidaya ganitri di Benakat adalah agroforestri dan monokultur. Pola agroforestri dengan tanaman keras yang diterapkan oleh masyarakat lebih kepada pembiaran tanaman bermanfaat (terutama tanaman buah) yang telah tumbuh sebelumnya, sehingga belum ada upaya pengaturan jenis atau komposisi

yang disengaja. Sementara praktek tumpang sari dengan tanaman palawija semusim, dilakukan terutama pada periode awal pertumbuhan tanaman (tahun pertama). Kegiatan ini lebih ditujukan sebagai upaya pemanfaatan kesuburan tanah pasca persiapan lahan, bukan semata pemanfaatan ruang tumbuh yang tersedia.

Sesuai dengan tujuan pengusahaan untuk produksi buah, maka pertumbuhan tajuk tanaman ganitri diusahakan dapat maksimal, sehingga jarak tanam yang digunakan cukup lebar. Jarak tanam yang digunakan minimal berkuran 10 x 10 m, tetapi pengaturan di lapangan terdapat 2 macam, yaitu: (1). Jarak tanam standar dengan jarak vertikal dan horizontal tanaman masing-masing 10 m dan (2). Jarak tanam 5 mata seperti pada tanaman sawit (jarak tanam diagonal), sehingga alokasi ruang tumbuh tanaman menjadi lebih optimal.

Persiapan lahan sebelum penanaman dilakukan secara total, tetapi teknik yang digunakan bisa tebas total yang dilanjutkan dengan penyemprotan herbisida, dibakar atau memanfatkan lahan bekas terbakar. Kegiatan pembersihan lahan ini dilakukan secara intensif, karena akan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman palawija. Penamanan bibit masih sederhana, belum dilakukan upaya pemberian pupuk dasar, baik pupuk organik maupun kimiawi. Pemeliharaan tanaman muda berupa pembersihan gulma dilakukan cukup intensif, sekitar 3 – 4 kali setahun, tergantung kondisi tanaman dan aktifitas tumpang sari yang dilakukan pada lahan tersebut. Penambahan input hara yang ditujukan khusus untuk tanaman ganitri masih dalam taraf uji coba, yaitu berupa pemberan pupuk NPK dalam dosis kecil (sekitar 10 gram/batang), karena selama ini hanya mengandalkan kesuburan tanah semata dan pemupukan tanaman palawija saja.

Walapun upaya penanaman ganitri telah dimulai cukup lama, praktek budidaya tanaman ganitri secara intensif baru dilakukan baru-baru ini saja. Umur tanaman ganitri yang ditemukan di lapangan umumnta masih muda, sekitar umur 1 atau 2 tahun.

Hasil pengukuran pertumbuhan tanaman ganitri menunjukkan adanya

variasi antara lokasi penanaman (Tabel 2). Perbedaan tersebut cenderung disebabkan oleh perbedaan pola pengelolaan yang dilakukan. Secara umum tanaman ganitri yang ditumpang sarikan memiliki pertumbukan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang tidah ditumpangsarikan, dengan riap pertumbuhan diameter maupun tinggi bisa mencapai 2 kali lipatnya.

Tabel 4. Pertumbuhan tanaman ganitri pada beberapa lokasi penanaman

Plot	Umur	Diameter Batang (cm)	Riap (MAI) Diameter (cm/tahun)	Tinggi Total (cm)	Riap (MAI) Tinggi (cm/tahun)	TBC (cm)	Diameter Tajuk (cm)	Keterangan
1	2	5.3	2.6	234.2	117.1	83.5	195.1	Tumpang sari singkong
2	2	6.1	3.0	218.5	109.3	93.1	240.0	Tumpang sari singkong
3	1	3.7	3.7	180.2	180.2	45.3	151.3	Tumpang sari singkong
4	1	3.3	3.3	148.7	148.7	49.5	137.8	Tumpang sari singkong
5	2	9.9	4.9	416.1	208.1	82.9	363.9	Tumpang sari palawija
6	2	9.8	4.9	406.2	203.1	111.8	344.7	Tumpang sari palawija
7	2	4.3	2.1	221.2	110.6	77.5	214.5	Tanpa tumpang sari
8	2	3.4	1.7	182.0	91.0	74.3	156.0	Tanpa tumpang sari

Sumber: Data Primer Penelitian (diolah)

Perbedaan jenis tanaman tumpang sari juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman gaitri. Tanaman ganitri yang ditumpangsarikan dengan tanaman palawija (kacang tanah, jagung atau tanaman sayur) memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibanding yang ditumpangsarikan dengan tanaman singkong. Hal ini terkait dengan ketersediaan unsur hara dan ruang tumbuh yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman ganitri. Input unsur hara pada tanaman palawija lebih banyak dibanding pada tanaman singkong, selain itu juga tanaman singkong termasuk tanaman yang efektif dalam penyerapan unsur hara (pustaka). Habitus tanaman singkong dan penanamannya yang rapat juga turut mengurangi ruang tumbuh vertikal bagi tanaman ganitri, terutama pada tanaman muda.

Praktek budidaya tanaman ganitri cukup potensial untuk diterapkan dalam rangka pengelolaan lahan terokupasi masyarakat di KHDTK Subanjeriji, bahkan di KHDTK lainya dengan kasus permasalahan lahan

yang hampir sama. Masyarakat masih dapat berusaha produktif tanpa harus mengorbankan tutupan lahan yang merupakan kawasan hutan.

Evaluasi Perkembangan Plot Kerja Sama di KHDTK Suban Jeriji

Pembangunan demplot agroforestry di KHDTK Suban Jeriji ditujukan sebagai contoh pengelolaan lahan berbasis tanaman kayu yang dilakukan oleh masyarakat penggarap. Model pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial lahan bagi masyarakat.

Pada akhir tahun 2015 telah dibangun 2 demplot yang dikelola oleh 2 orang petani dengan luas masing-masing 2 ha.

- ✓ Plot I: tanaman kayu bawang ditaman dengan jarak tanam 12 x 15 m dan sebagai border pada batas luar plot, tanaman jeruk lemon ditanam dengan jarak tanam 4 x 5 m, sedangkan tanaman palawija ditanam di sela-sela larikan tanaman utama (kayu bawang dan jeruk lemon).
- ✓ Plot II: tanaman kayu bawang ditaman sebagai tanaman border pada batas luar plot dengan jarak tanam setiap 5 m. Tanaman gaitri ditanam dengan jarak tanam 10 x 10 m dengan tanaman karet dan 20 x 10 m antar tanaman ganitri. Tanaman karet ditanam dengan jarak tanam 5 x 5 m, sedangkan tanaman palawija ditanam di sela-sela larikan tanaman utama.

Pengelolaan yang dilakukan pada plot I menunjukkan perkembangan yang dinamis. Pada akhir 2016, tanaman jeruk sudah mulai berbunga dan pada pertengahan tahun 2017, tanaman jeruk tersebut sudah berbuah dan bisa dipanen. Pemeliharaan tidak intensif, hanya dilakukan penebasan rumput agar tidak terlalu rimbun. Pertumbuhan tanaman kayu bawang cukup baik, tinggi tanaman sudah mencapai 1,5 m, tetapi sedikit terganggu oleh gulma.

Pengelolaan pada plot II masih terus berlangsung, tetapi tidak intensif, karena budidaya tanaman palawija hanya dilakukan sampai musim tanam pada awal 2016 dan selama tahun 2017 petani pengelola sama sekali

tidak menanam tanaman palawija. Kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan hanya tebas semprot yang dilakukan setiap 4 bulan sekali. Pertumbuhan tanaman ganitri cukup baik, diamater tanaman pada umur dua tahun telah mencapai 4,5 cm dan tinggi rata-rata 2 m, sedangkan diameter tajuk sekitar 175 cm. Jika dibandingakn dengan tanaman ganitri di Benakat (Tabel 1), pertumbuhan tanaman ganitri di lokasi ini cukup baik, baik pertumbuhan tinggi maupun diameternya. Bahkan perkembangan generatif tanaman ganitri di Suban Jeriji lebih cepat, hal ini terlihat dengan ditemukannya 2 batang tanaman ganitri yang sudah mulai belajar berbunga dan berbuah (umur 2 tahun), walaupun belum sampai matang karena diganggu monyet.

Keberhasilan upaya pengelolaan lahan budidaya pada ke dua plot tersebut lebih ditentukan oleh faktor pengelola, sedangkan teknis budidaya tanaman, baik tanaman kayu maupun tanaman palawija tidak mengalami kendala, pertumbuhan tanaman cukup baik dan mampu menghasilkan. Optimalisasi nilai manfaat lahan garapan melalui peningkatan nilai ekonomi produk budidaya masih terhambat oleh ketersediaan curahan waktu petani pengelola yang terbagi karena harus mengerjakan aktivitas lain (menyadap karet) di lokasi lain. Kenyamanan dan kebiasaan budidaya tanaman perkebunan, dalam hal ini tanaman karet, turut mengurangi minat pengelola untuk budidaya tanaman pertanian intensif, walaupun nilai ekonomi yang diperoleh bisa melebihi hasil kebun karet.

Model Pengelolaan Adaptif

Pola tanam campuran ideal yang dapat diterapkan di masyarakat adalah campuran komoditas jangka panjang dan jangka pendek, tanaman tahunan berkayu akan dikombinasikan dengan tanaman pertanian sebagai cash crops, sehingga pemenuhan kebutuhan pengelola dapat tercukupi.

Di sisi lain, budaya budidaya tanaman perkebunan, khususnya karet sudah berlangsung lama dan menjadi pilihan utama masyarakat. Oleh sebab itu maka komponen tanaman perkebunan akan sulit dihilangkan sebagai komponen penyusun kebun campuran. Porsi tanaman kayu kehutanan akan

menjadi komponen penyisip dalam lahan garapan. Model campuran yang dapat ditawarkan antara lain:

- ✓ Campuran tanaman kayu + palawija
- ✓ Campuran tanaman kayu + tanaman pekebunan (karet atau sawit)
- ✓ Campuran tanaman kayu + tanaman perkebunan + palawija

Dalam prakteknya, campuran tanaman kayu dan palawija hanya dapat dilakukan jika secara teknis lahan tersbut di bawah pengelolaan langsung BP2LHK Palembang dan patani penggarap hanya turut mengelola lahan tersebut selama kurun waktu tertentu, sepanjang kondisi ruang tumbuh tersedia untuk buddidaya tanaman pertanian.

Pola tanaman campuran tanaman kayu dan tanaman perkebunan lebih bisa diterapkan sebagi upaya pengayaan kebun-kebun masyarakat yang sudah terlanjur ditanami tanaman perkebunan (karet atau sawit). Tanaman kayu akan disisipkan di antara tanaman perkebunan yang telah ada sebelumnya. Jenis-jenis tanaman kayu toleran menjadi pilihan, misalnya meranti, gaharu, medang dan lainnya.

Pola tanam campuran antara tanaman kayu, perkebunan dan palawija telah dicoba diterapkan sejak awal pembangunan (Plot 2), tanaman ganitri dicampur dengan tanaman karet dan tanaman palawija. Pola ini relatif lebih bisa diterima oleh masyarakat, tetapi pada perjalannyanya akan berpotensibisa berubah menjadi pola tanam campuran tanaman kayu dan tanaman perkebunan, karena minat masyarakat yang masih rendah untuk budidaya tanaman palawija.

Saat ini, peluang pengembangan pola tanam campuran yang melibatkan komponen tanaman pertanian lebih berpeluang jika pengelolanya merupakan pendatang (misalnya dari lampung) yang memiliki budaya bercocok tanam palawija dan biasanya belum memiliki lahan garapan. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat "PENGAKU" lahan KHDTK Subanjeriji, masyarakat dari Lampung diijinkan ikut bercocok tanaman palawija di bawah tanaman karet muda masyarakat. Pemilihan komoditas tanaman kehutanan juga akan turut menentukan minat masyarakat untuk bersedia menerapkan pola campuran yang ditawarkan. Komoditas kehutana penghasil kayu akan lebih sulit untuk ditawarkan dibandingkan dengan tanaman penghasil HHBK. Ganitri merupakan salah satu contoh tanaman berkayu yang ditawarkan dan mulai dapat diterima.

Pembelajaran dari pembangunan demplot pengelolaan lahan adaptif dalam rangka pengelolaan kolaboratif KHDTK Suban Jeriji

Pembangunan demplot dalam kerangka penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui proses pengelolaan lahan bersama masyarakat dan penghidupan masyarakat berbasis lahan. Demplot yang dibangun baru dilakukan selama 2 tahun dalam luasan yang relatif kecil sehingga belum bisa disimpulkan hasilnya. Proses pembangunan demplot terus dilakukan dan memberikan beberapa pembelajaran sebagai berikut:

1. Pembagian ruang dalam pengelolaan lahan bersama masyarakat dapat dilakukan pada KHDTK Suban Jeriji berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama masyarakat dari awal perencanaan. Berbagi informasi dari tahapan perencanaan sampai dengan implementasi menjadi penting dalam penentuan jenis dan pola tanaman.
2. Komunikasi yang intensif dengan pengelola demplot di lapangan menjadi hal penting untuk memahami keinginan pihak pengelola dan masyarakat pelaksana di lapangan. Hal ini juga menjadi langkah awal untuk mengakomodasi dan menyelaraskan berbagai keinginan dalam penataan dan pengelolaan demplot. Monitoring yang rutin diserta diskusi lapangan menjadi upaya menjalin komunikasi yang lebih baik.
3. Komitmen dan konsistensi menjadi modal sosial yang penting dalam membangun demplot bersama masyrakat. Kepercayaan dibangun melalui komitmen dan konsistensi tim peneliti dalam membangun demplot bersama masyarakat.
4. Pemilihan jenis tanaman tidak hanya berdasarkan kesesuaian lahan saja namun pertimbangan waktu panen, keberlanjutan hasil dan aspek peluang pasar menjadi penting bagi masyarakat.
5. Pada kondisi kebutuhan rumah tangga akan pendapatan jangka pendek meningkat, pengelola lahan cenderung untuk meninggalkan lahan yang dikelolanya dan mencari sumber pendapatan lain seperti buruh tani, buruh non-tani dan jasa. Hal ini terjadi karena lahan yang dikelolanya belum memberikan hasil (tanaman belum panen) atau hasil panennya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini perlu dipahami untuk mencari solusi yang adaptif bagi masyarakat.
6. Mekanisme insentif dan disinsentif dalam kerjasama pengelolaan lahan bersama masyarakat menjadi potensi yang dapat dibangun untuk memotivasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan.

KESIMPULAN

KHDTK Suban Jeriji memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Keberadaan masyarakat dengan tanaman karet di dalam kawasan ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan ke depan. Masyarakat relatif terbuka dan akomodatif untuk mencari solusi pengelolaan lahan bersama. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat belum lama, antara 1-17 tahun, dan masyarakat menyadari bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang pernah dikelola. Sejarah pengelolaan kawasan hutan yang pernah dikelola PT. INHUTANI diakui oleh berbagai pihak seperti aparat desa, aparat kecamatan dan aparat kabupaten serta pihak swasta. Hal ini memudahkan dalam negosiasi upaya pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Akses menuju kawasan yang mudah dijangkau dan dekat dengan permukiman serta areal konsesi hutan tanaman industri PT.Musi Hutan Persada dapat memudahkan upaya pengelolaan. Dinamika sistem penghidupan masyarakat, penguasaan dan penggunaan lahan serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat menjadi sumber data dam informasi penting untuk penyusunan model pengeloaan kawasan.

KHDTK Suban Jeriji saat ini berada dalam posisi pengelolaan yang lemah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Penunjukkan BP2LHK Palembang sebagai pengelola kawasan tersebut belum disertai dukungan kebijakan anggaran dan alokasi sumberdaya manusia yang mencukupi. Hal ini berimbas pada minimnya kegiatan pengelolaan kawasan dan sangat terbatas fungsi penelitian dan pengembangan kawasan. Konsep pengelolaan KHDTK sampai dengan saat ini belum dimiliki oleh pengelola sehingga arah pengelolaan kawasan belum ada. Sosialisasi resmi keberadaan pengelola belum pernah dilakukan sehingga stakeholder dan masyarakat belum mengenal pengelola kawasan saat ini. Status pemantapan kawasan hutan baru berada pada taraf penunjukkan dan memerlukan proses penetapan kawasan hutan untuk memperkuat status kawasan.

Model pengelolaan kolaboratif KHDTK Suban Jeriji menjadi pilihan dalam mengelola kawasan hutan berdasarkan kondisi saat ini. BP2LHK Palembang tidak akan mampu mengelola kawasan hutan ini sendiri karena berbagai keterbatasan sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki. Langkah- langkah pengelolaan kolaboratif melibatkan

stakeholder di tingkat tapak sebagai aktor utama dalam upaya pengelolaan. Analisis stakeholder dan membangun komkunikasi menjadi dua hal penting dalam membangun pengelolaan kolaboratif KHDTK Suban Jeriji.

Kawasan ini dapat berkembang menjadi model litbang hasil hutan bukan kayu sebagai ciri khas pengelolaan KHDTK yang adaptif dan partisipatif. Diversifikasi jenis tanaman menjadi hal penting dalam pengembangan pengelolaan KHDTK yang mengakomodasi kepentingan para aktor terkait dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, keberlanjutan hasil dari komoditas dan prospek pasar. Pembagian ruang kelola kawasan menjadi hal penting dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Komitmen dan konsistensi yang dibangun pengelola dan stakeholder yang terlibat menjadi kunci modal sosial dalam pengelolaan kolaboratif kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aliadi, A. 2011. Pengembangan Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai: Kajian Melalui Riset Aksi. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.

Berkes, F. 2009. Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Manahgement* 90: 1692-1702.

Boucher, D., 2010. Deforestation today: It's Just Business. Tropical Forest and Climate. Union of Concerned Scientists, Briefing 7.

Bruce, JW. 1998. Review of tenure terminology. Tenure Brief No. 1. University of Wisconsin-Madison. USA.

Cater, J dan Gronow, J. 2005. Recent experience in collaborative forest management. *A Review Paper*. CIFOR.

Direktorat Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan. 2013. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Direktorat Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan.

Kemenhut. 2011. Statistik Kehutanan Indonesia 2011. Kementerian kehutanan. Jakarta.

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2015. Catatan Akhir Tahun. Konsorsium Pembaruan Agraria.

Nugroho, B. 2013. Reformasi kelembagaan dan tata kepemerintahan: faktor pemungkin menuju tata kelola kehutanan yang baik. Di Dalam Kartodihardo (eds.), *Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. FORCI Development.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Maryudi, A., Citraningtyas, ER., Purwanto, RH., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., Siswoko, BD. 2016. The emerging power od peasant farmers in the tenurial conficts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics* Vol. 67: 70- 75.

Ming'ate, FLM., Rennie, HG., Memon, A. 2014. Potential for co- management approaches to strengthen livelihoods of forest dependent communities: A Kenyan case. *Land Use Policy* 41: 304- 312.

Nurrochmat, DR., Nugroho, IA., Hardjanto, Purwadianto, A., Maryudi, A., Erbaugh, JT. 2017. Shifting contestation into cooperation: Strategy to incorporate different interest of actors in medicinal plants in Meru Betiri National Park, Indonesia. *Forest Policy and Economics* 83: 162-168.

Reed, MS., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, CH., Stringer, LC. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder

analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933- 1949.

Sardjono, MA. 2013. Membawa perhutanan sosial Indonesia ke upaya yang lebih menjanjikan. Di Dalam Kartodihardo (eds.), *Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. FORCI Development.

Sita, R. 2014. Pertarungan Kuasa dan Legitimasi atas Sumberdaya Hutan : Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.

Sumanto, SE. dan Sujatmoko, S. 2008. Kajian konflik pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala-Sumba Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol 5 No. 3.

Surati. 2014. Analisis sikap dan perilaku masyarakat terhadap Hutan Penelitian Parung Panjang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 11 No. 4: 339-347.

Syarifa, LN., Agustina, DS., Nancy, C., Supriadi, M. 2016. Dampak rendahnya harga karet terhadap kondisi sosial ekonomi petani karet di Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet* 34 (1): 119-126.

Tanjung, NS. 2016. Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.

Wakka. AK. 2014. Analisis stakeholder pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallaceae* Vol. 3 No. 1: 47-55.

Lampiran

1. Matriks *Logical Frame Work* (Kerangka Kerja Logis)

KERANGKA LOGIS PENELITIAN
"KEMITRAAN PENGELOLAAN KHDTK SUBAN JERIJI" TAHUN 2016

NO.	URAIAN KOMPONEN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
1	2	3	4	5
I.	***Sasaran*** 1. Menganalisis pola pengelolaan kawasan hutan yang terkonversi berdasarkan pembelajaran dari sistem penghidupan dan nafkah masyarakat, serta penguasaan penggunaan lahan di sekitar KHDTK Suban Jeriji; 2. Melanjutkan pembangunan demplot model pengelolaan lahan di KHDTK Suban Jeriji yang adaptif.	Diketahuinya pola pengelolaan kawasan hutan y terkonversi serta penguasaan penggunaan lahan di sekitar KHDTK Suban Jeriji. Terbentuknya demplot model pengelolaan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Lokasi yang representatif, dukungan dari masyarakat setempat, kerjasama dari parapihak terkait
II.	**Tujuan Khusus** 1. memperoleh pilihan model pengelolaan KHDTK Suban Jeriji yang adaptif, akomodatif dan melibatkan peran aktif para pihak terkait	1. Rekomendasi kebijakan model pengelolaan di KHDTK Suban Jeriji	Dokumen mengenai rekomendasi hasil penelitian dalam bentuk LHP, publikasi ilmiah	Lokasi yang representatif, dukungan dari masyarakat setempat, kerjasama dari parapihak terkait

III.	**Luaran** Diperolehnya skenario pengelolaan KHDTK Suban Jeriji dan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan KHDTK Suban Jeriji selanjutnya.	1. Tersusunnya paket data dan informasi mengenai perkembangan skenario pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan KHDTK Suban Jeriji	1. Dokumen data dan informasi skenaro pengelolaan KHDTK Suban Jeriji.	Tepat waktu, sesuai rencana
IV.	**Kegiatan** *multiple observer, multiple sources of data* (individu, rumah tangga, interaksi), *multiple methodologies* (wawancara survei, *participant observation*, wawancara dengan pihak ketiga), Pengukuran dan pemetaan lahan	Terlaksananya kegiatan sesuai jadwal dan volume pekerjaan	Dokumentasi hasil penelitian, presentasi hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian	Anggaran tersedia tepat waktu, tidak ada kendala lapangan berarti, koordinasi berjalan baik

Lampiran

Dokumentasi Kegiatan

a. Kegiatan wawancara masyarakat

b. Kegiatan diskusi dalam rangka pengelolaan plot kerjasama

c. Kegiatan evaluasi perkembangan kerjasama

d. Kegiatan pengkayaan jenis-jenis plot tanaman

e. Kayu bawang sebagai salah satu jenis tanaman kehutanan

f. Rudhraksa (ganitri) sebagai salah jenis tanaman HHBK potensial